

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hansen, Seng, 2015, Manajemen kontrak konstruksi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hasibuan, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara. Jakarta
- KPPU, *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2008, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Perdasa, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Jakarta
- Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta
- Siswanto, Arie, 2004, Hukum Persaingan Usaha , Ghaila Indonesia, Bogor
- Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta
- Syahrani, Ridwan, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Winokan, Iriane Cynthia. 2015. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategi Penawaran. Thesis, Uajy

### Artikel Jurnal

- Bahtiar Rifai, “Kendala Implementasi Kerja Sama Pemerintah Swasta (Kps) Kelistrikan Dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 24 (1), Tahun 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/201052-implementasi-kerja-sama-pemerintah-dan-s.pdf>, diakses 1 September 2021

Dwi N. Karakteristik Perjanjian Kerja sama Operasi/ Jointoperation. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. diakses 20 Agustus 2022

Hendry Irwanugroho, “Penjaminan Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 (1), November 2019, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243/192>, diakses 1 September 2021.

Ikka Puspitasari , Budi Santoso, “Perjanjian Kerja sama Pemerintah Dan Swasta Dengan Pola (Bot) Build Operate Transfer Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 (1), Tahun 2018., <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20237/13877>, diakses 1 September 2021.

Putri Anita Sitanggang, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, “Pelaksanaan Kontrak Kerja sama Dengan Sistem Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Meda-Kualanamu-Tebing Tinggi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 (2) Tahun 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17401/16656>, diakses 1 September 2021.

Riko Yuliardi, Akhmad Suradji, dan Busyra Afzeri, “Dokumen Kontrak Kerja sama Pemerintah Dan Swasta Untuk Investasi Infrastruktur Studi Kasus Rencana Pembangunan Kereta Api Shortcut Padang Solok”, *Rekayasa Sipil*, Vol. XII (2), Oktober 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/127484-ID-dokumen-kontrak-kerja-sama-pemerintah-dan.pdf>, diakses 1 September 2021.

Sudiarto, S., Niswah, F. Z., Pranoto, R. E. P., Hanifah, I., Enggardini, A. A., Masruroh, Z., & Muhammad, H. N. A. (2019). “Optimalisasi Pendidikan Kesehatan Kepada Remaja Melalui Aplikasi Android Profoteen”. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 2(2), 2019, <https://doi.org/10.32584/jkmk.v2i2.380>, dikses 20 Agustus 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1136/KPTS/M/2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 561/KPTS/M/2017 tentang Penugasan Kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II untuk menjadi Penanggung Jawab Proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 332/KPTS/M/2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong dan Djuanda;